

Praktik dan inovasi permodalan petani sawit di Malaysia dan Indonesia

Solusi permodalan jangka panjang dalam membangun rantai nilai berkelanjutan

Eelko Bronkhorst^a, Edoardo Cavallo^a, Mei-Mei van Dorth tot Medler^a, Sophie Klinghammer^a, Hans Harmen Smit^b, Arianne Gijzenbergh^b, Carina van der Laan^a

Pesan kunci

- Menyediakan permodalan jangka panjang bagi petani, terutama untuk peremajaan, berpotensi mendorong rantai nilai yang lebih berkelanjutan dalam produksi kelapa sawit. Upaya ini diperlukan sejalan dengan permintaan minyak kelapa sawit yang diperkirakan akan meningkat pada dekade mendatang.
- Perbankan enggan menyediakan permodalan bagi pekebun sawit karena biaya dan risiko yang tinggi. Padahal petani sangat memerlukan modal terutama untuk melakukan peremajaan. Minimnya akses petani pada permodalan dapat mengarah pada deforestasi ('tebang dan bakar'), penggunaan bibit berkualitas rendah dan praktik pertanian tak berkelanjutan lainnya.
- Dengan menyediakan akses permodalan jangka panjang, petani kelapa sawit terdorong untuk melakukan peremajaan, bukan memperluas lahan dengan melakukan deforestasi. Diperlukan pula dukungan bagi petani agar memiliki alternatif mata pencaharian untuk mengisi kekosongan penghasilan selama 3-5 tahun setelah penanaman. Menyadari peran penting petani dalam memenuhi permintaan global minyak sawit yang semakin tinggi, muncul berbagai skema permodalan inovatif dari sektor swasta, bank komersial, investor, lembaga permodalan pembangunan dan pemerintah.
- Tulisan ini mengevaluasi berbagai kebijakan dan skema permodalan, sekaligus dampaknya bagi pendapatan petani, praktik yang lestari dan lingkungan pada industri minyak sawit di Indonesia dan Malaysia. Tulisan ini juga menganalisis skema permodalan yang dapat mendukung pembangunan kelapa sawit lestari oleh petani sehingga pasokan petani dapat terjaga atau diperluas dengan menyempurnakan praktik berkelanjutan.

Pendahuluan

Produksi minyak sawit diperkirakan akan naik pada dekade mendatang, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan standar hidup masyarakat. Petani berperan besar dalam produksi minyak kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia, dua negara terbesar penghasil minyak sawit (FAOSTAT 2016). Petani kelapa sawit umumnya mempunyai luas lahan rata-rata dua hektar dan dapat dibedakan dari model organisasinya (Daemeter Consulting 2015), yaitu:

1. Petani mandiri skala kecil, terkait dengan rantai pasok melalui tengkulak lokal.
2. Petani mandiri skala besar, terkait dengan rantai pasok melalui pedagang lokal atau pabrik pengolahan.
3. Kelompok petani atau koperasi petani, melakukan jual beli langsung dengan pabrik
4. Petani pengelola lahan yang termasuk dalam skema plasma dengan perusahaan¹.
5. Petani pemilik lahan yang dikelola perusahaan.

^a Financial Access Consulting Services

^b SNV

¹ Dalam skema ini, petani perkebunan kelapa sawit mengolah wilayah 'plasma' di sekitar perkebunan 'inti' yang berada di bawah tanggung jawab perusahaan swasta (Budidarsono dkk. 2013).

Banyak petani memperoleh keuntungan cukup besar dari budidaya kelapa sawit (Rist dkk. 2010). Namun, keuntungan tersebut sering kali tidak terdistribusi secara merata di kalangan petani (Rist dkk. 2010) karena lemahnya perencanaan pemanfaatan lahan yang inklusif, persetujuan atas informasi awal tanpa paksaan, pengetahuan dan pengalaman praktik pengelolaan terbaik serta permodalan dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan. Berbagai hambatan tersebut mempengaruhi petani apapun model organisasinya. Oleh karena itu, laporan ini tidak membedakan antara petani mandiri dan petani yang terorganisir dalam koperasi atau plasma.

Perlu dicatat bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan dan petani kecil berperan dalam hilangnya tutupan hutan tropis dan konflik pemanfaatan lahan (Gerber 2011). Permodalan kelapa sawit sangat diperlukan, karena dalam 25 tahun ke depan (2017-2041), sekitar 175.000 hektare kelapa sawit harus diremajakan setiap tahun. Proses ini membutuhkan permodalan jangka panjang sebesar 700 juta dolar AS (sekitar 9,8 triliun Rupiah) per tahun (Direktorat Jenderal Tanaman Industri 2015).

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir ini. Penerapan skema permodalan dan kebijakan terkait pajak ekspor dan subsidi yang longgar berperan penting. Namun, dampak kebijakan dan skema permodalan ini tidak selalu menguntungkan petani, masyarakat lokal atau lingkungan hidup.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan terdahulu dan aktual, serta skema permodalan industri kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia. Evaluasi dampak berbagai model yang diterapkan pada petani dilakukan terkait kepastian penghasilan, praktik berkelanjutan dan dampak lingkungan hidup. Terakhir, dilakukan analisis terhadap skema permodalan yang mampu berkontribusi pada pengembangan petani kelapa sawit berkelanjutan, dan dibandingkan dengan skema terdahulu dan skema aktual. Fokus penelitian ini adalah petani kelapa sawit, yang berperan penting dalam industri kelapa sawit dan berperan penting dalam budidaya sawit di Malaysia, terlebih di Indonesia.

Penelitian ini menelaah pertanyaan berikut:

- Model permodalan apa yang ada di Indonesia dan Malaysia dulu dan sekarang, serta bagaimana perannya; apa dampak model tersebut bagi petani kecil terkait kepastian penghasilan, praktik berkelanjutan dan lingkungan?
- Skema permodalan inovatif apa yang berpotensi menguntungkan petani, khususnya dalam jangka panjang?
- Apa kondisi pemungkin bagi model permodalan inovatif untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan dan inovatif?

Laporan hasil penelitian dirangkum dalam tulisan ini. Sejumlah skema terdahulu dan skema aktual di Indonesia dan Malaysia dievaluasi melalui analisis literatur dan penilaian lapangan. Di Malaysia, tantangan permodalan jangka panjang yang dihadapi petani teratasi dengan skema permodalan dukungan pemerintah, dan oleh karena itu kurang relevan untuk didiskusikan di sini. Oleh karena itu, penelitian terkait skema permodalan inovatif dibatasi secara geografis untuk Indonesia saja. Laporan penelitian ini menawarkan model potensial untuk meningkatkan mobilisasi dana jangka panjang pada petani di sektor kelapa sawit, serta merefleksikan kondisi kunci pendorong agar hal itu terjadi.

Hasil

Mengembangkan permodalan jangka panjang berkelanjutan untuk petani kelapa sawit merupakan tantangan besar. Petani menghadapi kesulitan memenuhi persyaratan pemberi modal untuk menerapkan produksi berkelanjutan, jaminan pinjaman dan arus kas yang layak. Sementara penyedia jasa keuangan juga terkendala risiko dan biaya tinggi saat memberi pinjaman pada petani. Ketidakmampuan mendapat akses permodalan, khususnya pinjaman jangka panjang memperkecil peluang petani untuk berkembang, dan berpengaruh negatif terhadap produktivitas, serta menghambat kemampuan mereka untuk memenuhi standar berkelanjutan.

Baik di Indonesia maupun Malaysia, pembangunan kebun kelapa sawit petani secara strategis diadopsi dalam program pengentasan kemiskinan, yang sering dilakukan dengan memindahkan keluarga yang tak memiliki lahan. Pada tahap awal, skema yang mendukung petani (FELDA, Otoritas Pembangunan Lahan Federal di Malaysia; dan PIR-Trans, Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi di Indonesia) sangat bergantung pada anggaran pemerintah. Namun, pemerintah secara perlahan mengurangi dukungannya. Kemudian muncul berbagai model investasi yang lebih berorientasi komersial, melibatkan sektor swasta dan petani yang terorganisir dalam koperasi. Gambar 1 menunjukkan tinjauan umum skema permodalan untuk peremajaan yang tersedia bagi petani kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia.

Dengan fokus pada pembangunan perkebunan skala besar, model tersebut tidak selalu mampu menjawab kebutuhan petani kecil kelapa sawit secara efektif. Petani kecil di bawah skema PIR-Trans maupun KKPA (Koperasi Kredit Primer untuk Anggota) melaporkan berbagai isu dan tantangan. Isu dan tantangan tersebut terkait dengan implementasi model pembiayaan, antara lain lamanya waktu mendapat alokasi lahan dan kredit, petak alokasi yang sulit diakses, larangan tumpang sari tradisional, dan tingginya biaya penyiapan lahan (Vermeulen dan Goad 2006). Petani juga mengalami buruknya infrastruktur, lemahnya posisi dalam pengambilan keputusan dan masalah manajemen dalam koperasi. Mereka juga melaporkan tingkat bunga yang terlalu tinggi, serta tingginya cicilan (Feintrenie 2013). Dampak sosial dan lingkungan lebih besar, seperti deforestasi, eksploitasi sumber daya air berlebihan dan tingginya biaya hidup juga nyata terjadi (Vermeulen dan Goad 2006; Bissonette dan De Koninck 2015). Dalam mewujudkan rantai pasok kelapa sawit yang berkelanjutan dan inklusif, mekanisme permodalan dan dukungan baru perlu dikembangkan untuk mampu memenuhi kebutuhan petani dan mengatasi tantangan lingkungan dan sosial di sektor ini.

Berbagai skema permodalan inovatif dikembangkan untuk menjawab dan mengatasi kendala skema permodalan lama. Implementasi dilakukan oleh banyak pemrakarsa, seperti bank komersial, investor, lembaga permodalan pembangunan dan badan pemerintah yang menargetkan petani mandiri maupun plasma.

Rendahnya akses petani pada permodalan jangka panjang terjadi akibat tingginya biaya operasional pemberi kredit, terbatasnya jaminan dan belum cukupnya data finansial

Inisiasi	Swasta	<ul style="list-style-type: none"> ● Dana dukungan untuk petani RSPO (2013) Sertifikasi RSPO untuk petani kecil RSPO 	<ul style="list-style-type: none"> ● TLFF (2016) Permodalan untuk petani plasma 10–15 tahun ● IPODS / Musim Mas (2015) Permodalan petani + bantuan teknis (technical assistance/TA) ● Golden-Agri Resources (2016) Skema permodalan petani
	Publik	<ul style="list-style-type: none"> ● KKPA Indonesia (1995) Pinjaman bank yang disubsidi dan disalurkan melalui koperasi ● Konsep Baru Malaysia (1955) Dukungan untuk pengembangan sektor swasta LCDA ● TSSPK Malaysia (2011) Subsidi penanaman kembali, ~\$2.500 per ha ● FELCRA Malaysia (1966) Pengelolaan lahan masyarakat terpusat ● FELDA Malaysia (1956) Dukungan pinjaman untuk petani kelapa sawit – 15 tahun. 6,25%, ~\$5.000 per ha 	<ul style="list-style-type: none"> ● OPRPISF / Sinar Mas (2014) Permodalan petani plasma + TA, ~\$4.667 per ha ● Dana PBDP-KS (2015) Permodalan petani dalam skema plasma
		Terimplementasi	Konseptual

Status realisasi

Figure 1. Tinjauan umum skema permodalan untuk peremajaan di Indonesia dan Malaysia

Sumber: PSDonline, "Oil, palm; oil, palm kernel – Export – 2012-2016", USDA Foreign Agricultural Service.

(dan data lain) untuk membuat keputusan pemberian kredit. Kekosongan pendapatan yang dialami petani pada masa tanaman belum menghasilkan menjadi satu hambatan besar bagi pemberi kredit untuk membiayai petani. Meski sebagian besar skema permodalan inovatif yang dipaparkan dalam laporan ini baru-baru ini saja dikembangkan, peluncurannya dilakukan dalam skala yang terbatas karena menghadapi kendala dalam meningkatkan skala akses permodalan. Oleh karena itu, terlalu dini untuk menetapkan model mana yang paling berhasil dan menetapkan yang paling potensi untuk direplikasi dan diperluas agar menjangkau ratusan ribu petani mandiri yang membutuhkan permodalan jangka panjang. Bank belum bisa menjawab tantangan sistemik yang membuat petani kecil tidak menjadi sasaran menarik sebagai segmen bisnis prioritas.

Kebutuhan peremajaan kebun kelapa sawit makin mendesak kebutuhan permodalan jangka panjang bagi petani pada tahun-tahun mendatang. Sebagian besar bank di Indonesia belum memiliki kapasitas dan kemampuan dalam memenuhi permintaan pinjaman petani yang makin besar. Situasi di Malaysia sedikit berbeda, karena petani memiliki akses terbuka pada skema permodalan pemerintah. Sebagian besar kelapa sawit di Malaysia dibudidayakan di perkebunan milik perusahaan besar, hingga lebih mudah mendapatkan permodalan dari bank.

Pemerintah Indonesia mengambil beberapa inisiatif dalam mendukung peremajaan dan memberikan permodalan, misalnya dengan membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang menyediakan bantuan peremajaan kebun untuk petani. Namun, permodalan pada skala luas memerlukan pendekatan terintegrasi dan terprogram yang melibatkan pemerintah, sektor keuangan, organisasi petani, pabrik dan para pihak lain. Tanpa dukungan aktif yang besar dari pemerintah (subsidi suku bunga, jaminan pinjaman, kebijakan dan tindakan lainnya) sulit bagi sektor keuangan untuk mampu mengembangkan dan memperbesar pinjaman untuk mendukung petani mengisi kekosongan penghasilan yang mereka hadapi dalam periode penanaman.

Terdapat sejumlah kondisi untuk dapat membantu mengatasi kendala permodalan jangka panjang bagi petani dan menciptakan situasi yang mampu mendukung investasi kelapa sawit berkelanjutan. Kondisi tersebut yaitu: 1) insentif untuk memenuhi persyaratan berkelanjutan, antara lain praktik pertanian yang baik, sertifikasi RSPO dan produksi bebas-deforestasi, 2) kejelasan hak atas lahan, 3) pembenahan keterkaitan pasar antara petani kecil dan pabrik, 4) dukungan bagi penyedia jasa keuangan untuk menilai dan mengelola risiko, 5) organisasi petani yang kuat dan efektif.

Arah masa depan

Meski minat dari sektor swasta dalam permodalan petani kelapa sawit meningkat, masih ada senjang antara kebutuhan dan pasokan. Bank dan investor masih meyakini bahwa membiayai petani menguras biaya transaksi dan risiko tinggi, karena masih sedikit contoh sukses yang ada. Mengurangi biaya transaksi dan persepsi tingkat risiko, dan menciptakan kisah sukses akan mendorong mobilisasi permodalan sektor swasta. Di bawah ini, beberapa rekomendasi intervensi yang perlu dilakukan:

- **Petani** perlu didukung untuk: mengisi kekosongan penghasilan selama peremajaan, meningkatkan hasil panen dengan cara yang berkelanjutan, menyerap pengetahuan dan kapasitas untuk sertifikasi, memformalkan dokumentasi lahan, dan/atau mendapatkan akses ke pabrik, yang juga perlu mendapat insentif untuk membeli tandan buah segar pengaturan pasokan jangka panjang. Upaya ini akan mengurangi risiko penghasilan petani, dan membenahi risiko kredit bagi bank.
- **Lembaga keuangan** perlu didukung untuk mengembangkan model investasi yang memungkinkan penyaluran modal untuk petani pada skala lebih luas. Upaya ini meliputi penyempurnaan informasi mengenai kebutuhan permodalan petani dan skoring risiko kredit. Skoring ini membantu mengidentifikasi kelompok petani yang berpotensi layak mendapatkan pinjaman, untuk mengurangi biaya pinjaman bagi bank.
- **Organisasi petani**, seperti koperasi perlu diberi dukungan melalui intervensi terarah yang memungkinkan mereka untuk memperbaiki praktik manajemen dan keterlacakan minyak kelapa sawit dalam rantai pasok. Upaya ini akan mendorong mereka bertindak sebagai agregator pengumpulan data dan distribusi pinjaman untuk petani, untuk mengurangi biaya dan risiko bagi pemberi pinjaman.

Penelitian lebih jauh dapat dilakukan dengan fokus pada:

- 1) identifikasi persyaratan spesifik dan pertimbangan pinjaman setiap bank, lembaga keuangan mikro dan investor lain;
- 2) analisis lebih dalam mengenai kebutuhan intervensi spesifik petani, khususnya selama periode peremajaan dan
- 3) mengukur dampak berkelanjutan model permodalan petani yang saat

ini sedang diimplementasikan, serta menelaah bagaimana model tersebut dapat diperluas untuk menjangkau kelompok yang lebih besar yang membutuhkan permodalan jangka panjang.

Ucapan terima kasih

Penelitian ini didanai oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (United States Agency for International Development/USAID) melalui proyek "Peran Permodalan dalam Integrasi Petani Kecil Kelapa Sawit ke dalam Rantai Nilai Berkelanjutan." Penelitian ini merupakan bagian Program Penelitian CGIAR mengenai Hutan, Pohon dan Wanatani (CRP-FTA). Penelitian ini didukung oleh CGIAR Fund Donors. Daftar lengkap donor CGIAR-Fund, bisa dilihat di: www.cgiar.org/funders

Referensi

- Bissonnette J dan De Koninck R. 2015. *Large plantations versus smallholdings in Southeast Asia: Historical and contemporary trends*. Conference Paper No. 12. 5-6 Juni 2015. Chiang Mai University, Thailand.
- Budidarsono S, Susanti A dan Zoomers A. 2013. *Oil Palm Plantations in Indonesia: The Implications for Migration, Settlement/Resettlement and Local Economic Development*. Chapter 6 in Biofuels - Economy, Environment and Sustainability, Prof. Zhen Fang (Ed.), InTech, DOI: 10.5772/53586.
- Daemeter Consulting. 2015. *Indonesian oil palm smallholder farmers: A typology of organizational models, needs, and investment opportunities*. Daemeter Consulting, Bogor, Indonesia.
- Directorate General of Estate Crops. 2015. *Tree Crop Estate Statistics of Indonesia 2014-2016*. Jakarta, Indonesia.
- [FAOSTAT] Food and Agriculture Organization of the United Nations Data. 2016. Roma: FAO. Diakses 12 Juni 2017. <http://faostat3.fao.org/home/E>.
- Feintrenie L. 2013. *Oil Palm Business Models*. 4e Conférence Internationale Biocarburants et Bioénergies. 2ie, CIRAD, 21-23 November 2013. Ouagadougou, Burkina Faso: Ministère des Mines et de l'Énergie.
- Rist L, Feintrenie L dan Levang P. 2010. The livelihood impacts of oil palm: Smallholders in Indonesia. *Biodiversity and Conservation* 19:1009–1024. doi:10.1007/s10531-010-9815-z.
- Vermeulen S dan Goad N. 2006. *Towards better practice in smallholder palm oil production*. Natural Resource Issues Series No. 5. International Institute for Environment and Development. London, Inggris.



PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani

Program Penelitian CGIAR tentang Hutan, Pohon, dan Wanatani (FTA) adalah penelitian terbesar di dunia dalam program pembangunan guna meningkatkan peran hutan, pohon, dan wanatani dalam pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan, serta untuk mengatasi perubahan iklim. CIFOR memimpin FTA dalam kemitraan dengan Bioversity International, CATIE, CIRAD, ICRAF, INBAR dan TBI.



cifor.org

forestsnews.cifor.org



Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)

CIFOR meningkatkan kesejahteraan manusia, kesetaraan dan integritas lingkungan dengan melakukan penelitian inovatif, mengembangkan kapasitas para mitra dan terlibat secara aktif dalam dialog dengan semua pemangku kepentingan untuk memberi masukan terhadap berbagai kebijakan dan praktik yang memengaruhi hutan dan masyarakat. CIFOR merupakan bagian dari Pusat Penelitian CGIAR, dan memimpin Program Penelitian CGIAR pada Hutan, Pohon dan Wanatani (FTA). Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Nairobi, Kenya, Yaounde, Kamerun, dan Lima, Peru.

